

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmadi, Adib (editor). 2005. Panduan Pengawasan Keuangan Daerah, Wawasan dan Instrumen Monitoring Keuangan Daerah. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia dan Uni Eropa.
- Afrizal, 2014. Metode Penelitian Kualitatif, sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eindhoven, Myrna 2014. Politik Lokal di Indonesia : Penjajah Baru ? Identitas, Representasi dan Pemerintahan di Kepulauan Mentawai Pasca Orde Baru
- Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Franz Magnis Suseno. 2003. Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia.
- Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017.
- Kecamatan Sipora Utara Dalam Angka, 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016.
- Kecamatan Sipora Utara Dalam Angka, 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016.
- Keller, Suzanne. 1995. Penguasa dalam Masyarakat Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi : Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta : Erlangga.

- Liz dan Stepen, 2000, Political Man, The Social Bases of Politics. New York.
- Lexy J. Moleong. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : ANDI offset.
- Nordholt, Henk Schulte dan Van Klinken, Gerry, 2006. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa". Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Puriyadi, 2007. Siasat Anggaran (Posisi Masyarakat dalam Perumusan Anggaran Daerah). Yogyakarta: Lokus Tiara Wacana Group.
- Rasyid, Muhammad Ryaas 2002. Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Rubin, Irene S, 2000. The Politics of publik Budgeting : Getting and Spending, Borrowing and Balancing. New York, Seven Bridges Press, LLC.
- Savage, James D, 2005. Making The EMU (The Politics of Budgetary Surveillance and The Enforcement of Maastricht). New York, OXFORD University Press
- Sjamsiar, Syamsuddin, 2007. Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik. Malang: Agritek YPN Malang Kerjasama dengan CV. SOFA Mandiri dan Indonesia Print
- Solekhan, Moch, 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang : Setara Press
- Wahab, Solichin Abdul. 1999. Ekonomi Politik Pembangunan. Bisnis Indonesia Era Orde Baru Ditengah Krisis Moneter. Malang: Brawijaya University Press.

Wildavsky Aaron dan Caiden Naomi. 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*.
Penyadur; Suraji, Sufiansyah. Yogyakarta: Matepena Consultindo.

Hasil Penelitian/Jurnal

Artrian, Aldy. 2011. *Kontestasi Aktor Perumus Kebijakan Anggaran Daerah (Studi Kasus dalam Penyusunan APBD Kota Bontang Tahun 2010)*.
Tesis MAP UGM. Yogyakarta. Hal.143.

Putra, Chandra Kusuma. Pratiwi, Ratih Nur. Suwondo. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa : Studi kasus Desa Wonorejo Kecamatan Singosari etKabupaten Malang*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, Nomor 16. Hal. 1203-1212. 2010.

Riyanto, Agus. 2012. "Politik Anggaran Povinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 – 2010". Dalam *SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*. Vol.12 Nomor 2, Juli 2012

Rohman, Hermanto. *Dinamika Politik Reformasi Anggaran Pro Rakyat (Studi Kepentingan Politik Budget Actors dalam Pembahasan APBD Propinsi Jawa Timur 2010)*. *Jurnal Politik*, UGM

Rosalinda, Okta LPD. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, Juni 2014

Suparman. Kusnadi, Dedi. Haryono, Dwi. *Implementasi Program Alokasi Dana Dedi Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*, 2014.

Suraji, *Mengkaji Substansi Politik Anggaran*. *Artikel Politik*, UGM.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyerahan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Kepada Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Kedudukan Keuangan Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pendayagunaan Kawasan Pedesaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.

Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 188.45 - 332 Tahun 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2013

Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 188.45 - 370 Tahun 2013 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2014

Sumber Internet

<http://www.keuangandes.com/2017/03/pengertian-undang-undang-desa-dan-keistimewaanya/>, diakses tanggal 7 Agustus 2017, pukul 21.00.

http://www.academia.edu/documents/in/Politik_anggaran/, diakses pada tanggal 6 Februari 2017, pukul 09.00